

---

## **Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Kota Dumai Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan**

Wan Taufik Hidayat<sup>a</sup>, Zulkarnaen Noerdin<sup>b</sup>, Andrizal<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: wantaufik1979@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnaennoerdin65@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: andrizal@unilak.ac.id

---

### **Abstract**

According to Law Number 40 of 2009 concerning Youth, regional governments are responsible for carrying out youth development. The method used in this research is sociological legal research. The author also conducted direct interviews with several stakeholders. The youth development program is carried out by the city government in the form of a program to increase youth faith and piety, a program to increase youth capacity, a program to increase youth entrepreneurship, Empowerment of Youth Organizations. However, in reality there is still a lack of youth development programs and activities, the obstacles are the lack of budget support allocated for Youth Empowerment, the lack of facilities and infrastructure for creative youth such as youth empowerment centers and sports facilities. To overcome these problems, the amount of the budget for youth empowerment is increased, youth facilities and infrastructure are provided in each sub-district, youth human resources are improved, the role of the private sector/companies is optimized and synergy with other related is increased

**Keywords: Empowerment, Youth, Region**

### **Abstrak**

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemda bertanggung jawab melaksanakan pembangaunan pemuda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Penulis juga melakukan interview langsung dengan stake holder bahwa pembangunan kepemudaan dilakukan oleh pemerintah kota dalam bentuk program peningkatan iman dan takwa pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan kewirausahaan pemuda, Pemberdayaan Organisasi Pemuda, namun kenyataannya masih minimnya program dan kegiatan pembangunan kepemudaan, yang menjadi hambatan adalah minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Pemuda, masih minimnya sarana dan prasarana untuk pemuda berkreatifitas seperti sentra pemberdayaan pemuda, fasilitas olahraga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya jumlah anggaran untuk pemberdayaan pemuda ditingkatkan, sarana dan prasarana pemuda disetiap kecamatan disediakan, SDM Pemuda ditingkatkan, peran swasta/perusahaan dioptimalkan dan sinergitas dengan OPD terkait lainnya ditingkatkan.

**Kata Kunci: Pemberdayaan, Pemuda, Daerah**

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah

penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain. Pemuda merupakan generasi penerus masa depan bangsa ini, oleh karenanya peran dan fungsinya perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat pembangunan Indonesia<sup>1</sup>

Laju perubahan zaman telah menempatkan pemuda dalam situasi yang berbeda. Bila pada masa lalu pemuda dihadapkan pada tantangan seputar perjuangan dan pergolakan sosial-politik nasional, kini pemuda ditantang untuk terlibat dalam agenda-agenda besar pembangunan, baik secara global maupun nasional. situasi tersebut mau tak mau menuntut kesiapan pemuda dari berbagai sisi, baik pendidikan, kepemimpinan, perekonomian, karakteristik, maupun daya kompetisi. Namun, seiring dengan hal tersebut kondisi kepemudaan Indonesia sendiri saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan cukup berarti. Persoalan berkelanjutan dari buruknya kualitas pendidikan, hingga pengangguran membayangi upaya penguatan kepemudaan. Tidak berhenti di situ, persoalan kekerasan muncul dan mendominasi pemberitaan tentang pemuda di media. Beberapa hasil kajian membuktikan bila pemuda Indonesia masih memiliki daya kompetisi dan menunjukkan kualitas pendidikan yang rendah. Sebagai negara yang aktif terlibat dalam perkembangan global dan agenda pembangunan berkelanjutan, Indonesia jelas memiliki tugas untuk menyiapkan generasi pemudanya melalui upaya-upaya pembangunan pemuda. Tidak hanya agar siap dalam berkompetisi secara global saja, tapi juga dapat terlibat secara aktif dalam menentukan perubahan.<sup>2</sup> Pemuda dalam perkembangannya menghadapi berbagai persoalan, sehingga perlu dicari solusinya dengan melibatkan semua pihak terkait. Beberapa persoalan yang dihadapi pemuda dewasa ini, antara lain:

- a) terbatasnya lapangan kerja, menjadi beban bagi keluarga maupun negara, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lain bagi pemuda itu sendiri.
- b) penyalahgunaan obat narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak fisik dan mental pemuda
- c) pergaulan bebas yang menunjukkan gejala penyimpangan perilaku seperti pelecehan seksual, pornografi, perkosaan dan/ atau prostitusi;

---

<sup>1</sup> Andrizal, “ *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*, Andrew Law jurnal vol 1 Juni tahun 2022

<sup>2</sup> Muhammad Lukman Hakim “ *Kebijakan Pembangunan Pemuda Strategi dan Tantangannya*” MNC Malang Februari 2021

- d) masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat merusak mental pemuda;
- e) perkawinan di bawah umur yang masih banyak dilakukan sebagian anggota masyarakat terutama pemuda; dan
- f) kenakalan remaja atau tawuran.
- g) Kecanduan Game online dan Judi online dan lain sebagainya

Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 13 dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Pembangunan kepemudaan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, kesehatan mental dan fisik, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta pemberdayaan generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Di dalam Undang-undang Kepemudaan tersebut mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk menggerakkan dan memfasilitasi pembangunan kepemudaan di wilayahnya masing-masing

Sementara itu dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai sejak tahun 2020-2023 program kegiatan yang mendukung dalam rangka pelibatan Pemuda hanya ada dua kegiatan saja yaitu kegiatan Paskibaraka dan kegiatan Merching Band. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diamanahkan oleh undang undang kepemudaan itu, dimana seharusnya ada kegiatan penyadaran , pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemuda di Kota Dumai, namun fakta yang terjadi dalam 4 (empat) tahun terakhir bertolak belakang.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka lebih lanjut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pembangunan Kepemudaan, sehingga Penulis pada penelitian ini mengangkat judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan”**.

## A. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap pembentukan hukum positif dan berlakunya hukum positif. Penulis mengambil lokus penelitian di Kota Dumai dengan melihat trend anggaran, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan Dispora Kota Dumai mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 dimana masih sangat minim kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemudanya. Populasi dan Sampel digunakan dalam penelitian ini adalah Komisi 1 DPRD Kota Dumai, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai, Akademisi Kota Dumai, Ketua KNPI Kota Dumai, dan Tokoh Pemuda Dumai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara diolah, disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan rinci. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus terhadap fakta atau kenyataan yang ada dengan teori-teori yang ada.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan, lebih lanjut dalam pasal 13 mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan pemuda sesuai dengan cirikhas dan potensi daerah. Pemberdayaan dan pembangunan pemuda mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, kesehatan mental dan fisik, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta pemberdayaan generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Tabel-1  
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2022

NO	15-19 TH	20-24 TH	25-29 TH	30-34 TH	TOTAL PEMUDA
----	----------	----------	----------	----------	--------------

---

**KECAMATAN**

1	DUMAI BARAT	3.654	3.827	3.965	3.534	14.980
2	DUMAI TIMUR	5.838	6.264	6.151	5.646	23.899
3	BUKIT KAPUR	4.566	4.874	4.473	4.239	18.152
4	SUNGAI SEMBILAN	3.291	3.831	3.861	3.717	14.700
5	MEDANG KAMPAI	1.338	1.400	1.493	1.488	5.719
6	DUMAI KOTA	3.470	3.739	3.618	3.270	14.097
7	DUMAI SELATAN	4.223	4.652	4.825	4.341	18.041
	<b>TOTAL</b>	<b>26.380</b>	<b>28.587</b>	<b>28.386</b>	<b>26.235</b>	<b>109.588</b>

*Sumber : RKPD Kota Dumai Tahun 2022*

Jumlah pemuda Kota Dumai berdasarkan kelompok umur (usia 15-34 tahun) tahun 2022 sebanyak 109.588 jiwa atau 34% dari total penduduk (331.445 jiwa). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 51,39% laki-laki dan 48,60% perempuan. Dengan melihat jumlah penduduk yang berada dalam rentang usia Pemuda 34% dari total penduduk Kota Dumai yang berjumlah 331.445 jiwa, dengan rata-rata usia muda 16 sampai 30 tahun maka bisa dikatakan bahwa Pemuda merupakan salah satu kekuatan demografi utama Kota Dumai dan sebagaimana yang terjadi secara umum di Indonesia, terutama Provinsi Riau, maka Kota Dumai bisa dikatakan berada dalam ambang bonus demografi. Alokasi kebijakan dan porsi anggaran belanja daerah yang proporsional untuk melindungi kepentingan Pemuda dengan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan tentu harus mendapat perhatian yang serius.

#### **A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan**

Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan stake holder terkait yakni Kadiskopar

Dumai, Komisi 1 DPRD, Rektor IAITF, Ketua KNPI dan Tokoh Pemuda Kota Dumai dapat penulis sampaikan sebagai berikut.

Menurut Kadiskopa Kota Dumai Bapak Nurzewan yang lebih akrab dipanggil Pak Tam ini terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemko Dumai dalam pembangunan Kepemudaan ini akan menjadi fokusnya kedepan dalam pencapaian target Renstra Diskopar yakni Persentase pemuda aktif dan persentase wirausaha muda sebesar 65 persen, yang akan disiapkan program/kegiatan pada bidang Pemuda, apalagi pada tahun 2023 ini Perda Pemuda sudah disahkan artinya kedepan akan kita siapkan grand desain pembangunan pemuda di Kota Dumai. Memang diakui beliau seketika baru dilantik awal tahun 2023 setelah mempelajari Renstra dan Renja Diskopar, memang minim sekali alokasi anggaran untuk bidang Pemuda dimana hanya ada 2 (dua) kegiatan pada Bidang tersebut yakni kegiatan Pembinaan Paskibraka dan kegiatan Merching Band, apalagi ditahun 2024 Kegiatan Paskibraka akan pindah ke Badan Kesbangpol tentu semakin berkurang kegiatan di Bidang Pemuda yang melibatkan Kepemudaan, namun beliau tetap yakin dengan adanya Undang-Undang Pemuda dan PERDA Kepemudaan akan bisa meyakinkan Pimpinan dalam hal ini Walikota Dumai dan DPRD Kota Dumai dengan menyiapkan Grand Desain Kepemudaan dimana pada Tahun 2024 akan dilakukan Penyusunan Dokumen RAD ( Rencana Aksi Daerah) Layanan Kepemudaan.

Dimana nantinya akan melibatkan OPD Terkait lainnya untuk bersama sama melaksanakan Pembangunan Kepemudaan, Dokumen RAD ini nantinya menjadi acuan Diskopar dan OPD terlibat lainnya untuk menganggarkan program kegiatan yang melibatkan Pemuda pada OPD Masing-masing selama 5 (lima) tahun. Selain RAD Pihak Diskopar melalui Bidang Pemuda juga akan melakukan kegiatan Sosialisasi PERDA nomor 5 tahun 2023 tentang Pembangunan Kepemudaan dengan mengundang Organisasi Kepemudaan, Perwakilan Mahasiswa dan Pelajar, tokoh pemuda untuk bersama sama membicarakan dan merumuskan konsep Pembangunan Pemuda Kota Dumai, menampung aspirasi para Pemuda kota dumai seperti apa pemikiran mereka sehingga bisa disinkronkan dengan Pejabat Bidang Kepemudaan untuk menuangkan dalam program kegiatan pada Bidang Pemuda setaiap tahunnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Nurzerwan, Kadispora Kota Dumai pada tanggal 21 Desember 2023 di Ruang Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dumai

Sementara itu menurut Arya Ketua KNPI Kota Dumai selama 4 tahun saya bernaung dibawah KNPI kegiatan kegiatan yang melibatkan Pemuda yang dilakukan oleh pihak Dispora sangat minim sekali, kegiatan kepemudaan seperti Pelatihan Pemuda, Bantuan modal usaha untuk pemuda, sarana dan prasarana Pemuda untuk berkreaitifitas, dan kegiatan kemepudaan lainnya tidak pernah lagi dilakukan oleh Pihak Dispora Dumai memang dulu pernah ada pelatihan wirasuha muda tapi sudah lama sekali kalua tidak salah terakhir dilakukan 2018, pasca covid pihak Dispora tidak ada lagi melakukan kegiatan pelatihan yang melibatkan pemuda, hanya saja ada kegiatan provinsi yang ditaja oleh Dispora Provinsi yang difasilitasi oleh Diskopar Kota Dumai dengan mengirimkan beberapa orang Pemuda Dumai ada juga dari anggota KNPI yang ikut kegiatan Pelatihan Pemuda di Provinsi Riau. Namun syukur Alhamdulillah Pihak Pemko Dumai yang diinisiasi oleh Komisi I DPRD Kota Dumai telah menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang Pembangunan Kepemudaan dimana Kami dari Pihak KNPI diajak beberapa kali untuk rapat di Komisi I berdiskusi membahas substansi dari Perda Pemuda tersebut. Mudah mudahan dengan adanya Perda Pemuda itu bisa menjadi semangat bagi Pemko Dumai dalam hal ini Diskopar Kota Dumai untuk membuat berbagai program kegiatan Kepemudaan seperti seminar pemuda, debat pemuda, kewirausahaan pemuda dan lain lain.<sup>4</sup>

Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Dumai Bapak Edison SH, beliau mengungkapkan bahwa menurut UU Pemuda Tanggung Kita selaku Pemko Dumai adalah memberdayakan pemuda, Pemuda adalah ujung tombak dalam pembangunan sudah saatnya Pemuda diberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan di Kota Dumai ini.karena mereka para pemuda adalah generasi berikutnya yang akan menggantikan posisi kita kedepan, otomatis kita harus persiapkan mereka dalam setiap sesuatu hal yang positif. Pemko Dumai harus memberikan kepercayaan kepada mereka dengan berbagai macam kegiatan kepemudaan, kita siapkan sarana dan prasarananya, kita persiapkan mereka menjadi pemuda yang berwirausaha, kita latih mereka dengan berbagai kegiatan pelatihan dan seminar sehingga mereka benar benar siap untuk terjun kelapangan menuju masa depan yang lenih cemerlang.paling tidak mereka pemuda memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan kota Dumai.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara penulis dengan Arya Ketua KNPI Kota Dumai pada tanggal 18 Desember 2023 di Kantor Dispora Dumai

<sup>5</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Edison,SH Ketua Komisi 1DPRD Kota Dumai pada tanggal 20 Desember 2023 di Kedai Kopi Umi Dumai

Seterusnya penulis juga mewawancarai Pak Dr. Rozai selaku Rektor IAI Dumai, menurut kami Pemko Dumai masih jauh dari harapan terkait pembangunan sector kepemudaan sebagaimana diamanatkan undang undang kepemudaan, apalagi dengan hadirnya Perda Kepemudaan yang sudah dirancang dan disahkan oleh DPRD Kota Dumai kedepan bagaimana Pemko Dumai dalam hal ini Depertemen terkait yang menangani Kepemudaan hendaknya lebih terukur, lebih inovatif memilih program kegiatan kepemudaan yang betul betul tepat sasaran seperti beberapa waktu yang lalu Ketika saya hadir diacara Seminar Pemuda yang ditaja oleh Pihak Dispora itu bagus sekali memang itulah yang dibutuhkan Pemuda, buat diskusi, tampung apa aspirasi pemuda itu, kadang pemikiran para pemuda lebih kreatif lebih inovatif untuk pembangunan sector kepemudaan, karena mereka yang lebih paham apa yang mereka inginkan dilapangan, Pemko memfasilitasinya. Siapkan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan, ada pondok pemuda, sentra pemberdayaan pemuda, Pustaka untuk pemuda, sanggar seni, fasilitas olahraga dan lain sebagainya, libatkan mereka dalam proses pembangunan, berikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi maka itu menjadi pemicu semangat untuk pemuda lebih kreatif lagi lebih aktif lagi dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan<sup>6</sup>

## **B. Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembangunan kepemudaan**

Menurut Bapak Edison, SH (Wakil Ketua Komisi ! DPRD Dumai) yang menjadi hambatan adalah kondisi keuangan/keterbatasan anggaran, kekurangan SDM, kalau bisa OPD Diskopar membuat kegiatan yang Nampak dan melibatkan pemuda, walaupun keterbatasan anggaran tapi sebaiknya Kadis mencoba berkoordinasi dengan kami selaku Dewan meyakinkan DPRD terhadap kegiatan yang dibuat dalam Kepemudaan, bisa saja akan kami bahas pada rapat komisi I. Sumber daya pemuda juga menjadi perhatian mereka harus mampu, jangan nanti ketika kita beri kepercayaan mereka tak mampu/lemah, namun demikian pasti ada pemuda pemuda yang sukses baik itu menjadi wirausaha muda, menjadi politisi dan sebagainya, ini baiknya bisa dijadikan panutan/ccontoh ketika pelaksanaan seminar atau

---

<sup>6</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Dr. Rozai Rektor IAITF Kota Dumai pada tanggal 21 Desember 2023 di Aula Hotel Grand Zuri urutDumai

pelatihan pemuda, pemuda yang sukses itu memberikan motivasi kepada juniornya atau pemuda yang lainnya semacam kiat-kiat menjadi seorang pemuda yang sukses.

Sementara itu Ketua KNPI Sdr Arya mengatakan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai salah satunya adalah minimnya kesadaran dari beberapa pihak seperti stake holder/forkopimda/legislative/eksekutif terhadap peran penting dan potensi pemuda dalam pembangunan di Kota Dumai sehingga alokasi dana untuk pembangunan pemuda masih jauh dari harapan ataupun target. Pembangunan Kepemudaan belum menjadi agenda Penting Pemerintahan hal ini terbukti dengan minimnya alokasi anggaran, program kegiatan di OPD terkait yang memiliki wewenang mengurus pemuda. Selain itu hambatan pembangunan kepemudaan yang lainnya adalah masih minimnya sarana dan prasarana untuk pemuda berkreatifitas seperti gedung pemuda, sarana olahraga, sanggar seni tersebut banyak digunakan pihak Pemko, TNI/Polri, Swastas, Partai Politik dan pihak swasta lainnya, dengan kata lain padatnya agenda di TBG tersebut sehingga tidak bisa digunakan Pemuda secara maksimal.

Sedangkan dari sudut pandangan Tokoh Pemuda Dumai ( Sdr M. Khadafi) Menurut beliau Pemerintah terkesan abai atau kurang perhatian terhadap pembangunan pemuda, pemuda dibiarkan berkembang sendirinya kurang ada rangsangan atau fasilitasi dari Pemko, dari sisi Pemuda juga ada masalah banyak organisasi kepemudaan yang mati suri atau hidup segan mati tak mau, hal ini terlihat dari minimnya aktifitas organisai kepemudaan itu sendiri, KNPI yang merupakan induk organisasi Pemuda saat ini pun sedang bergejolak/polemic kepengurusan dualisme bahkan ada tiga ketua KNPI dengan versi masing-masing. Minimnya kegiatan organisasi tersebut mungkin disebabkan tidak adanya anggaran bantuan dari pemerintah Kota Dumai atau bisa jadi tidak sampai tingkat bawah hanya segelintir pengurus KNPI yang menikmati. Peran perusahaan atau swasta juga minim sekali terhadap pembangunan pemuda, padahal Kota Dumai banyak sekali perusahaan perusahaan besar seperti PHR, Sinar Mas, Wilmar, Semen Padang dan Perusahaan besar lainnya. Namun kurang berkontribusi dalam pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai. Ini menjadi PR Pemerintah bagaimana kedepan Perusahaan itu digandeng diajak rapat/musyawarah untuk ikut terlibat dalam pembangunan pemuda melalui dana CSR Nya.

Dr. Rozai berpandangan Sebagai hambatan bahwa dengan perkembangan wilayah industry kota dumai akan berdampak semakin berkurangnya tingkat entrepreneurship pemuda, kurangnya kreatif pemuda, kurangnya minat pemuda menjadi wirausaha muda

karena begitu tamat sekolah langsung bekerja di industry tersebut. Hal ini perlu sharing pemuda dengan pihak Pemko dalam hal ini Dinas Kemepudaan, Disnaker bagaimana agar pemuda betul betul disiapkan menjadi pemuda yang siap pakai mampu dan mampu bersaing dengan pemuda dari daerah lainnya.

Menurut Pak Nurzerwan ketika penulis menanyakan apa hambatan yang dihadapi Pemko Dumai dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Pembangunan Kepemudaan Kota Dumai, tidak menapik hambatan pertama adalah kondisi anggaran Kota Dumai dimana APBD Kota Dumai banyak tersedot untuk Pembangunan Fisik seperti Pembangunan Islamic Center, Jalan, pembangunan Drainase untuk mengatasi banjir sehingga anggaran untuk OPD lain memang banyak yang di reconfusing, tidak hanya Diskopar Dumai saja namun hampir semua OPD juga mengalami hal yang sama, namun demikian saya pasti akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk pembangunan Kepemudaan ditahun 2024 melalui anggaran perubahan begitu juga untuk tahun 2025 nantinya kita akan fokus membangun sektor pemuda ini terlebih sudah ada Perda no 5 tahun 2023 tentang Pembangunan Kepemudaan. Ditahun 2024 ini kami fokus menyusun kajian Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan yang merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan tidak hanya Dispora saja tapi juga OPD lain yang akan melibatkan Pemuda.<sup>7</sup>

Selain persoalan anggaran kami juga akui masih kurang SDM kami yang menguasai dan memiliki konsep pembangunan kepemudaan itu seperti apa sehingga kami bisa mencari solusi, baru beberapa bulan ini Alhamdulillah kami memiliki Kabid yang baru dilantik akhir 2023 kemarin yang cukup aktif berdiskusi dengan kami dan okp sehingga kami yakin kedepan pembanguan kepemudaan ini akan teratasi.

Selanjutnya ruang-ruang kreatifitas bagi pemuda memang masih minim seperti sentra pemberdayaan pemuda, sanggar seni untuk pemuda, fasilitas olahraga seperti lapangan bola, voley, GOR masih kurang, taman bacaan untuk pemuda dan fasilitas yang dibutuhkan pemuda lainnya. Pada tahun 2025 akan dibangun GOR mewah dengan anggaran 38 Milyar ini bisa digunakan untuk pemuda para pecinta olahraga dan seni untuk latihan dan kegiatan kepemudaan.

---

<sup>7</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Nurzerwan, Kepala Dispora Kota Dumai pada tanggal 21 desember 2023

### **C. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan kepemudaan**

Menurut Khadafi Tokoh Pemuda Dumai, untuk mengatasi hambatan pembangunan pemuda adalah dengan cara duduk bersama antara Pihak Pemko, Perwakilan OKP, Perusahaan, tokoh Pemuda memiliki komitmen bersama bagaimana untuk meningkatkan pembangunan kepemudaan itu sendiri. Pemko menyiapkan sarana dan prasarana bagi pemuda untuk beraktifitas dan berkreatifitas apakah itu gedung pemuda, sarana prasarana olahraganya, gedung kesenian bagi pemuda, dan sarana lainnya yang dibutuhkan pemuda, Perusahaan juga bisa memainkan perannya dengan memberikan dukungan anggaran melalui dana CSR nya, atau pemuda menyiapkan program/kegiatan yang produktif dan inovatif lalu menyiapkan proposal untuk selanjutnya bisa dibiayai oleh pihak Pemko dan Perusahaan/Swasta yang ada di Kota Dumai.

Organisasi KNPI Berpendangan upaya yang dapat dilakukan untuk pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai yaitu dengan menunjang SDM Pemuda, menyiapkan Pemuda Dumai siap pakai melalui kegiatan seperti Pelatihan Pemuda, Seminar Pemuda, Banch marking atau studi tiru, dan menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan pemuda untuk meninggkkan potensi dan inovasi.

Rektor IAITF Berpendapat upaya yang dapat dilakukan untuk pembangunan pemuda yaitu menyiapkan SDM, Mengalokasikan Pendanaan untuk Pemuda, melakukan Pelatihan yang dibutuhkan pemuda, melakukan pembinaan yang serius seperti memberdayakan balai kerja bagi pemuda, melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha. Seharusnya pihak Dispora melakukan identifikasi kekuatan instansinya jika memang masalah anggaran menjadi pemicu minimnya kegiatan kepemudaan, kan bisa dilakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan di beberapa Kecamatan seperti di Sungai Sembilan, di Medang Kampai, Bukit Kapur yang notabene memiliki banyak Perusahaan besar yang berdomisili disana melalui hubungan kemitraan atau melalui dana CSR, namun tentunya harus disiapkan proposalnya terlebih dahulu sehingga bisa meyakinkan pihak perusahaan. Atau bila perlu diundang perusahaan tersebut untuk dilakukan kerjasama pembangunan sektor kepemudaan. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan Diskopar Dumai adalah mencoba melobi anggaran Provinsi bahkan

Anggaran pusat yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga baru kali ini ada space atau bantuan anggaran untuk Daerah Kabupaten Kota atau bisa juga diajak sharing budget terkait program kegiatan kepemudaan.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Dumai ( Edison, SH) mengatakan Pertama kami harap pihak Dispora menyiapkan perencanaan program dan kegiatan kepemudaan lengkap dengan maksud, tujuan dan target yang diharapkan lalu sampaikan kepada kami Komisi 1 DPRD untuk selanjutnya kita bahas bersama pada rapat komisi sehingga bisa yakinkan kami untuk menambah pagu anggaran Dispora Kota Dumai untuk pembangunan kepemudaan, apalagi Dumai Sudah memiliki Perda no 5 tahun 2023 tentang Pembangunan Kepemudaan. Pemuda masih belum memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses-proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Yang terjadi adalah posisi pemuda masih diletakkan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek/pelaku pembangunan. Hal ini diantaranya disebabkan minimnya komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemuda tentang tahapan dan proses pembangunan, coba kedepan pemuda lebih dilibatkan dalam proses pembangunan kepemudaan itu sendiri. Ajak mereka berdiskusi bagaimana pemikiran pemuda pemuda untuk kemajuan kota dumai di sektor kepemudaan.

Lalu selanjutnya coba dibuat semacam alat ukur dan indikator untuk melihat sejauh mana kegiatan dan program kepemudaan yang telah berjalan memiliki implikasi terhadap peningkatan kapasitas pemuda menyebabkan tidak terukurnya pencapaian program pembangunan kepemudaan yang sudah berjalan selama ini. Saat ini indikator yang ada lebih bersifat kuantitatif, yang hanya mencakup besaran peserta maupun daya jangkau kegiatan, Padahal dampak lebih jauh yang diharapkan adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang seharusnya dapat diukur secara lebih spesifik.

Nurzerwan selaku Kepala Dinas Kepemudaan mengatakan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah Pembangunan Kepemudaan di Kota Dumai adalah pertama di tahun 2024 Diskopar Dumai akan bekerjasama dengan Perguruan tinggi, BPS, Bappeda dan OPD terkait lainnya untuk merumuskan konsep Pembangunan Kepemudaan, melakukan grand desain perencanaan Pembangunan Kepemudaan 5 tahunan 2024-2029, lalu melakukan koordinasi lintas sektoral bidang kepemudaan terkait sinergi program dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah se Kota Dumai. Dokumen RAD tidak hanya sebatas sebagai

dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu dibidang kepemudaan, tetapi lebih dari itu Ia nya harus menjadi komitmen OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan baik dilaksanakan oleh masing-masing OPD maupun secara kolektif lintas OPD yang terkait kepemudaan. kegiatan kepemudaan banyak tersebar di masing-masing OPD sehingga koordinasi diperlukan agar program dan kegiatan kepemudaan tersebut tidak saling tumpang tindih dan dilaksanakan secara parsial, makanya disinergikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan output dan outcome yang lebih optimal serta dapat diukur tingkat capaian keberhasilannya.

Selanjutnya lagi kata beliau dengan adanya koordinasi strategis tersebut akan terjadi optimalisasi anggaran kepemudaan lintas instansi sehingga dapat dipastikan hasil pelaksanaan kegiatan akan berdampak positif dan memiliki resonansi yang lebih kuat bagi peningkatan kualitas pemuda. Memang kita akui koordinasi lintas instansi itu mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, namun demikian betapapun sulitnya menjalankan koordinasi dan membangun sinergi lintas sektoral bidang kepemudaan, tetap harus optimis bahwa setiap ikhtiar harus dilakukan.

### **C. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda,. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari data 4 tahun terakhir terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Dumai masih minim sekali program dan kegiatan pembangunan/pemberdayaan kepemudaan seperti Pelatihan Pemuda, Bantuan modal usaha untuk pemuda, sarana/prasarana atau ruang pemuda untuk berkreatifitas, bahkan bisa dikatakan tidak pernah dilakukan lomba-lomba kepada pemuda/okp dan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi yang biasanya dilakukan di kabupaten/kota lain pada saat acara hari sumpah pemuda.
2. Hambatan-hambatan dalam MengImplementasikan Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda antara lain minimnya dukungan

anggaran, terbatasnya jumlah SDM di Bidang Kepemudaan , Selanjutnya ruang-ruang kreatifitas bagi pemuda memang masih minim terutama di Kecamatan seperti sentra pemberdayaan pemuda, sanggar seni untuk pemuda, fasilitas olahraga seperti lapangan bola, voly, GOR masih kurang, taman bacaan untuk pemuda dan fasilitas yang dibutuhkan pemuda lainnya.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Dumai dalam Pembangunan Kepemudaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda adalah antara lain : Jumlah anggaran untuk Pembinaan pemuda ditambah, SDM/Aparatur Pembina Pemuda kuatkan, sarana dan prasarana untuk pemuda beraktifitas disiapkan, kegiatan kepemudaan diaktifkan, bantuan hibah untuk organisasi pembina pemuda ditingkatkan, hubungan kemitraan dengan perusahaan dijalin, peran OPD lainnya dilibatkan, penghargaan kepada pemuda atas dedikasi dan prestasinya diberikan

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku**

Muhammad Lukman Hakim, *Kebijakan Pembangunan Pemuda Strategi dan Tantangannya*, MNC Malang Februari 2021

LP3N, *Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Permasalahan*, Jakarta, 2015,

Cicik Kurniawati, *Pemberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Nasional*, Sakamitra Kompetensi, November 2022

Munir Fuadi, *Teori-teori besar (Grand Teori) Dalam Hukum* (Prananda Media Grup 2014)

Rizkan Zulyadi , *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan.2020, Enam media)

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 320

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981

Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, 2005. Pustaka pelajar, Yogyakarta

##### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor  
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 5 tahun 2023 tentang Pembangunan Kepemudaan

### **Jurnal Hukum dan lain lain**

Andrizal, “ *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*, Andrew Law jurnal vol 1 Juni tahun 2022.

Parulian Hasiholan Siagian, *Kewenangan Pemerintah dibidang Kepemudaan dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional*, Universitas Jayabaya Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syari, vol 9 no 6 2022

Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, ( September – Desember, 1997)

Seri Hartati & Bahjatul Murtasidin, “ *Efektivitas Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Riau tahun 2014-2016 (Studi Kasus pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga)* “ Jurnal Dinamika Pemerintahan, Vol.2 No 2 Agustus 2018, hal 110-126

According to Law Number 40 of 2009 concerning Youth, regional governments are responsible for carrying out youth development. The method used in this research is sociological legal research. The author also conducted direct interviews with several stakeholders. The youth development program is carried out by the city government in the form of a program to increase youth faith and piety, a program to increase youth capacity, a program to increase youth entrepreneurship, Empowerment of Youth Organizations. However, in reality there is still a lack of youth development programs and activities, the obstacles are the lack of budget support allocated for Youth Empowerment, the lack of facilities and infrastructure for creative youth such as youth empowerment centers and sports facilities. To overcome these problems, the amount of the budget for youth empowerment is increased, youth facilities and infrastructure are provided in each sub-district, youth human resources are improved, the role of the private sector/companies is optimized and synergy with other related OPDs is increased